

## Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa dan Sanksi Administrasi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Nurdalia<sup>1\*</sup>, Juliyanti Sidik Tjan<sup>2</sup>, Dahliah Baharuddin<sup>3</sup>, Ummu Kalsum<sup>4</sup>  
[nurliahsudirman97@gmail.com](mailto:nurliahsudirman97@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [juliyantisidik.tjan@umi.ac.id](mailto:juliyantisidik.tjan@umi.ac.id)<sup>2</sup>, [dahliah.dahliah@umi.ac.id](mailto:dahliah.dahliah@umi.ac.id)<sup>3</sup>,  
[ummu.kalsum@umi.ac.id](mailto:ummu.kalsum@umi.ac.id)<sup>4</sup>

<sup>1\*</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

<sup>2,3,4</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan mengamati pengaruh secara simultan antara surat teguran, surat paksa, dan sanksi administrasi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) di KPP Pratama Makassar Selatan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan, di mana 30 responden diberikan kuisioner/lembaran pernyataan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama antara surat teguran, surat paksa, dan sanksi administrasi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Penelitian ini menemukan bahwa surat teguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, demikian pula dengan surat paksa dan sanksi administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut memainkan peran penting dalam meningkatkan penerimaan PPN. Dengan demikian, penelitian ini memberikan bukti bahwa penggunaan surat teguran, surat paksa, dan sanksi administrasi dapat efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai. Temuan ini memiliki implikasi yang relevan bagi KPP Pratama Makassar Selatan dalam mengoptimalkan kebijakan dan strategi dalam mengelola penerimaan PPN. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang peran dan implementasi efektif dari surat teguran, surat paksa, dan sanksi administrasi dalam konteks perpajakan.

**Kata Kunci:** Pajak pertambahan nilai; Sanksi administrasi; Surat paksa; Surat teguran



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

### Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang masih tergolong dalam kategori negara berkembang, yang artinya bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia belum mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan tingkat tinggi seperti yang dirasakan masyarakat di negara-negara maju. Namun dengan potensi yang dimiliki Indonesia membuat pemerintah percaya bahwa Indonesia mampu menjadi negara maju. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya melalui peningkatan perekonomian dengan melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa untuk melakukan pembangunan di berbagai sektor, bukanlah hal mudah dilakukan karena membutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya setelah tanggal jatuh tempo pembayaran (Hazra, Pangemanan dan Tirayoh, 2015:4). Berdasarkan Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 bahwa tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis oleh pejabat atau kuasa pejabat setelah setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Mardiasmo, 2011:127).

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa denda bunga dan kenaikan. Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang perpajakan salah satu contohnya tidak memasukkan/melapor/menyampaikan SPT. Sanksi bunga biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar dan sanksi kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang bayar. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabeaan yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi . Pengertian PPN ditinjau dari sudut ilmu hukum yaitu suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan pemikul beban pajak dengan kedudukan penganggung jawab pembayaran pajak ke kas negara pada pihak – pihak berbeda (Sukardji, 2014:2).

## Metode Analisis

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif untuk mengetahui pengaruh variable. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui surat teguran (X1), surat paksa (X2), sanksi administrasi (X3) dan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (Y). Objek dalam penelitian ini adalah surat teguran, surat paksa, dan sanksi administrasi. Subjek penelitian ini adalah KPP Pratama Makassar Selatan.

Arikunto (2002) populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Jadi yang dimaksud dengan pupulasi individu yang memiliki sifat yang sama walaupun prosentase kesamaan itu sedikit, atau dengan kata lain seluruh individu atau wakil populasi yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Sampel merupakan sebagian populasi yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat dan ukuran yang dikehendaki dari suatu populasi siregar (2010 : 145). Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan nonprobability sampling dengan teknik sampling jenuh. Sampling jenuh adalah penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

## Hasil Penelitian

**Hasil Uji Instrumen Penelitian**

**Hasil Uji Validitas**

Uji Validitas (uji kesahihan) adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur sah/valid tidaknya kuisioner. Uji validitas dilakukan dengan cara menguji korelasi antara skor item dengan total masing-masing variabel, menggunakan pearson correlation. Butir pertanyaan dikatakan valid apabila tingkat signifikannya dibawah 0,05.

**Tabel 1** Hasil Uji Validitas

Butir Pertanyaan	Pearson Corelation	Sig (2-Tailed)	Keterangan
X1	P1	0,725**	VALID
	P2	0,589**	VALID
	P3	0,744**	VALID
	P4	0,700**	VALID
	P5	0,617**	VALID
X2	P1	0,766**	VALID
	P2	0,716**	VALID
	P3	0,554**	VALID
	P4	0,689**	VALID
	P5	0,405**	VALID
X3	P1	0,536**	VALID
	P2	0,804**	VALID
	P3	0,621**	VALID
	P4	0,592**	VALID
	P5	0,709**	VALID
Y	P1	0,732**	VALID
	P2	0,447**	VALID
	P3	0,781**	VALID
	P4	0,741**	VALID
	P5	0,514**	VALID

Tabel menunjukkan hasil uji validitas pada empat variabel yang terdiri dari Surat Teguran, Surat Paksa, Sanksi Administrasi dan Pajak Pertambahan Nilai.Valid, karena nilai Sig lebih kecil dari 0,05.

### Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel dari atau konstruk. Uji reliabilitas ini dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban dari responden melalui pertanyaan yang diberikan, menggunakan metode statistik Cronbach Alpha dengan signifikansi yang digunakan dari (>) 0,6. Adapun hasil dari pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 2** Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
----------	------------------	------------

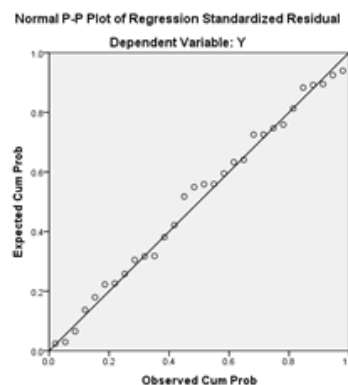
Surat Teguran	0,695	Reliabel
Surat Paksa	0,616	Reliabel
Sanksi Administrasi	0,647	Reliabel
Pajak Pertambahan Nilai	0,665	Reliabel

Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel surat teguran, surat paksa, sanksi administrasi dan pajak pertambahan nilai mempunyai nilai cronbach's alpha lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa item pertanyaan dalam penelitian ini bersifat reliable. Sehingga setiap item pertanyaan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten dan apabila pertanyaan diajukan kembali maka akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### Hasil Uji Normalitas

Model regresi, error yang dihasilkan mempunyai distribusi normal atau tidak Uji Normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah. Dalam penelitian ini untuk menguji normalitas data digunakan grafik Normal p-p plot of Regression Standardized Residual yang hasil pengujiannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



**Gambar 1** Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

#### Hasil Uji Multikolonieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel independen dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel independennya, maka hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya menjadi terganggu. Untuk menguji multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai VIF (Variance Inflation Faktor). Jika nilai VIT tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model dapat

dikatakan terbebas dari multikolonieritas. Hasil pengujian multikolonieritas dapat dilihat pada tabel berikut:

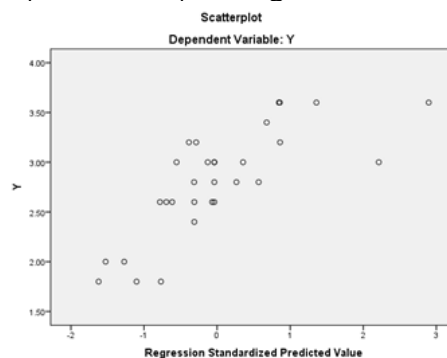
**Tabel 3** Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	.668	1.496
	X2	.682	1.466
	X3	.967	1.035

Berdasarkan tabel 3, terlihat bahwa variabel Surat Teguran, Surat Paksa, Sanksi Administrasi dan Pajak Pertambahan Nilai memiliki nilai tolerance diatas 0,1 dan VIF lebih kecil dari 10. Hal ini berarti dalam model persamaan regresi tidak terdapat gejala multikolonieritas sehingga data dapat digunakan dalam penelitian ini.

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians pada residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatterplot dimana penyebaran titik-titik yang ditimbulkan terbentuk secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu serta arah penyebarannya berada diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 2** Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar grafik scatterplot tersebut menunjukkan bahwa data tersebar pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola yang jelas dalam penyebaran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi tersebut, sehingga model regresi layak digunakan untuk pajak pertambahan nilai dengan variabel yang mempengaruhi yaitu surat teguran, surat paksa dan sanksi administrasi.

### Hasil Uji Hipotesis

#### Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah hasil uji asumsi klasik dilakukan dan hasilnya secara keseluruhan menunjukkan model regresi memenuhi asumsi klasik, maka tahapan berikut adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi berganda.

**Tabel 4** Model Persamaan Regresi

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t		Tolerance	VIF
1	(Constant) -1.074	.655		-1.639	.113		
	X1	.344	.156	.337	2.201	.037	.668
	X2	.378	.163	.352	2.323	.028	.682
	X3	.564	.166	.433	3.406	.002	.967

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel, persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah:

$$Y: -0,74 + 0,344X1 + 0,37X2 + 0,564X3 + e$$

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: Nilai konstan adalah -1,074 ini menunjukkan bahwa, jika variabel independen (surat teguran, surat paksa dan sanksi administrasi bernilai 0), maka nilai variabel dependen pajak pertambahan nilai akan menurun sebesar -1,074 satuan. Koefisien regresi surat paksa (b1) adalah 0,344 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,344 jika nilai variabel X1 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya yang searah antara variabel surat teguran (X1) dengan variabel pajak pertambahan nilai (Y). Semakin tinggi surat teguran maka pajak pertambahan nilai akan semakin meningkat. Koefisien regresi surat paksa (b2) adalah 0,378 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,378 jika nilai variabel X2 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara surat paksa (X2) dengan variabel pajak pertambahan nilai (Y). Semakin tinggi surat paksa yang diterbitkan kantor KPP Pratama Makassar Selatan maka pajak pertambahan nilai semakin meningkat. Koefisien regresi sanksi administrasi (b3) adalah 0,564 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,564 jika nilai variabel X3 mengalami satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel sanksi administrasi (X3) dengan variabel pajak pertambahan nilai (Y). Semakin tinggi sanksi administrasi yang diberikan KPP Pratama Makassar Selatan maka pajak pertambahan nilai akan semakin meningkat.

#### Uji R<sup>2</sup> (Koefisien Determinasi)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.

**Tabel 5** Hasil Uji Koefisien Determinasi

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.770 <sup>a</sup>	.593	.546	.36074
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1				
b. Dependent Variable: Y				

Dari tabel 5 terdapat angka R sebesar 0,770 yang menunjukkan bahwa hubungan antara, pajak pertambahan nilai dengan ketiga variabel independennya sangat kuat, karena berada didefinisi sangat kuat yang angkanya diantara 0,700-1. Sedangkan nilai R square sebesar 0,593 atau 59,3% ini menunjukkan bahwa variabel pajak pertambahan nilai dapat dijelaskan oleh variabel surat teguran, surat paksa, dan sanksi administrasi sebesar 53,9% sedangkan sisanya 46,1% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

### Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan uji t yaitu dengan melihat nilai signifikansi t hitung, jika nilai signifikansi t hitung < dari 0,05 maka dapat dikatakan variabel independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut.

**Tabel 6** Hasil Uji Parsial (Uji t)

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1.074					
		.655		-1.639	.113		
	X1	.344	.156	.337	2.201	.037	.668
	X2	.378	.163	.352	2.323	.028	.682
	X3	.564	.166	.433	3.406	.002	.967
							1.035
a. Dependent Variable: Y							

Melalui statistik uji-t terdiri dari surat teguran (X1), surat paksa (X2), dan sanksi administrasi (X3) dapat diketahui secara parsial pengaruhnya terhadap pajak pertambahan nilai (Y). Pengujian Hipotesis Pertama (H1), Tabel juga menunjukkan bahwa variabel surat teguran memiliki tingkat signifikan sebesar 0,037 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai t yang bernilai 2,201 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen hal ini berarti H1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa surat teguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak pertambahan nilai. Pengujian Hipotesis Kedua



(H2), Tabel menunjukkan bahwa variabel surat paksa memiliki tingkat signifikan sebesar 0,028 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai t yang bernilai 2,323 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen hal ini berarti H2 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa surat paksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak pertambahan nilai. Tabel juga menunjukkan bahwa variabel sanksi administrasi memiliki tingkat signifikan sebesar 0,002 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai t yang bernilai 3,406 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen hal ini berarti H3 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak pertambahan nilai.

### Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas secara menyeluruh terhadap variabel terikat dilakukan dengan menggunakan uji F. Uji ini menggunakan  $\alpha 5\%$  dengan ketentuan, jika signifikansi dari F hitung < dari 0,5 maka hipotesis yang diajukan dapat diterima.

**Tabel 7** Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA <sup>a</sup>						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.937	3	1.646	12.645	.000b
	Residual	3.383	26	.130		
	Total	8.320	29			

a. Dependent Variable: Y  
b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Tabel 7 menunjukkan bahwa tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa surat teguran, surat paksa dan sanksi administrasi secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap pajak pertambahan nilai, dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pajak pertambahan nilai.

## Pembahasan

### Pengaruh surat teguran terhadap pajak pertambahan nilai

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak pertambahan nilai. Semakin tinggi surat teguran yang diterbitkan oleh KPP Pratama Makassar Selatan maka penerimaan pajak pertambahan nilai akan semakin meningkat. Hal ini dapat disebabkan karena surat teguran bisa mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk membayar pajaknya sehingga pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Makassar Selatan akan semakin meningkat.

### Pengaruh Surat Paksa Pajak Pertambahan Nilai

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak pertambahan nilai. Semakin tinggi surat paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Makassar Selatan maka penerimaan pajak pertambahan nilai akan semakin meningkat. Hal ini dapat disebabkan karena



surat paksa bisa mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk membayar pajaknya sehingga pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Makassar Selatan akan semakin meningkat.

### **Pengaruh sanksi administrasi terhadap pajak pertambahan nilai**

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak pertambahan nilai. Semakin tinggi sanksi administrasi yang diterbitkan oleh KPP Pratama Makassar Selatan maka penerimaan pajak pertambahan nilai akan semakin meningkat. Hal ini dapat disebabkan karena sanksi administrasi bisa mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk membayar pajaknya sehingga pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Makassar Selatan akan semakin meningkat.

### **Simpulan dan Saran**

Berdasarkan data yang telah dan pengujian hipotesis dengan analisis linear berganda telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Surat teguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak pertambahan nilai. Semakin tinggi surat teguran maka pajak pertambahan nilai akan semakin meningkat; Surat paksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak pertambahan nilai. Semakin tinggi surat paksa maka pajak pertambahan nilai akan semakin meningkat; Sanksi administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak pertambahan nilai. Semakin tinggi sanksi administrasi maka pajak pertambahan nilai akan semakin meningkat.

Saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: Sampel dalam penelitian ini sedikit dan hanya terbatas pada karyawan yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Disarankan penelitian selanjutnya dapat menambah serta memperluas wilayah dan jumlah sampel; Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah jumlah variabel baru selain dalam penelitian ini agar lebih mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pajak pertambahan nilai. Karena masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi pajak pertambahan nilai selain variabel dalam penelitian ini; Diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi KPP Pratama Makassar Selatan terkait untuk lebih meningkatkan hasil kerja yang berkualitas; Selain menggunakan kuesioner, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan metode wawancara langsung kepada responden. Penelitian selanjutnya harus melakukan penelitian di waktu yang tepat dalam penyebaran kuesioner, karena pada akhir dan awal tahun karyawan sangat sibuk dalam melaksanakan tugasnya sehingga tidak fokus dalam menjawab kuesioner.

### **Daftar Pustaka**

Adriani Sutedi, Hukum Pajak, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011)

Ana, Awa O, Siting N (2017). "Peranan Penagihan Tunggal Pajak Terhadap Pertumbuhan Pajak". Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang.

Arikunto, S. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

- Chandraningtyas, L. (2018). Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Kediri. *Ekonomi-Akuntansi*, 14(02.01), 0128.
- Daud, A., Sabijono, H., & Pangerapan, S. (2018). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Nenggapratama Internusantara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02).
- Dewi, t. L. (2016). Pengaruh pemeriksaan pajak penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Periode 2011-2014) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung).
- Erwis, N. A. (2012). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Skripsi. Makasar. Universitas Hasanudin.
- Fikriningrum, Winda Kurnia. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang.
- Caundisari). Skripsi. Semarang: Universitas Diponorogo.
- Hazra, Pangemanan, Tirayoh. 2015. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal EMBA Vol. (3) No.4* :1-12.
- Hutagaol, John. 2007. *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hutapea, h. D. (2020). E efektivitas tindakan penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, spmp dalam mencapai target penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak (kpp) pratama medan polonia. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 24-37.
- Ihyaditama, A. H. (2020). Analisis Efektivitas Pembayaran Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
- Ilyas, B. Wirawan, Richard Burton. 2013. *Hukum Pajak (Teori Anlisis dan Perkembangannya)*. Edisi 6. Jakarta : Salemba Empat
- Imam Ghozali. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Semarang: UNDIP.
- Irmayana, I. (2020). Pengaruh surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang terhadap penerimaan tunggakan pajak (Studi pada KPP Pratama Makassar Selatan) (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Isawati, T., K, H. E. S., & Ruliana, T. (2016). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu). *Ekonomi a17 Agustus 1945 Samarinda*, 5(3), 1–8.
- J Najoan, M. P., Morasa, J., & Wokas, H. R. (2016). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Kotamobagu. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4).*urnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(1).

- Jusuf Badudu, Zain, S. M. (1994). Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kurniawan, Panca dan Bagus Pamungkas. 2006. Penagihan Pajak di Indonesia, Edisi Pertama, Bayumedia Publishing, Malang.
- Lamia, A. (2015). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi.
- Lubis, R. H. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Penerimaan Pajak (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran). Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen, 1(1), 1-8.
- Majid, R. A., & Ghozali, I. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan emisi gas rumah kaca pada perusahaan di indonesia (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Mangowal, M. C., & Rondonuwu, S. (2021). Efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada kantor wilayah direktorat jenderal pajak sulawesi utara, tengah, gorontalo dan maluku utara. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 9(2).
- Mardiasmo (2016). Perpajakan edisi terbaru. Andi ; Yogyakarta
- Mardiasmo (2018). Perpajakan edisi terbaru. Andi ; Yogyakarta
- Mardiasmo, 2009. Perpajakan Indonesia. Edisi Revisi. Jogjakarta: Andi
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: ANDI
- Marellu, A., Sondakh, J. J., & Pangerapan, S. (2017). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Tahuna. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 12(2).
- Muda, H., Pangemanan, S. S., & Tirayoh, V. Z. (2016). Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 3(4).
- Muda, Hazra, dkk. (2015). "Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung".
- Nasution, R. H., & Rifa, D. (2013). Pengaruh Inflasi, Jumlah Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kota Padang. Jurnal Perpajakan.
- Nindar, M. R., Pangemanan, S. S., & Sabijono, H. (2014). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.
- Novita, W. (2016). Kamus Ilmiah Populer (Lengkap). Surabaya: Widya. Comp.
- Priantara, Diaz. (2016). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- PUTRA, M. L. B. (2021). Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa Dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak: Studi Kasus Pada Kpp Pratama Sleman.
- Rusdji, Muhammad. 2005. PSPP Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Indeks. Jakarta.
- Saidi, M. D. (2014). Pembaruan Pajak, Jakarta : Rajawali Pers.
- Sari, D. P. (2012). Persepsi wajib pajak terhadap Pajak Penjualan Atas Barang Mewah pada Kantor Pelayanan Pajak di kota Makassar (Doctoral dissertation, Universitas Hassanuddin). Sari, D. P. (2012). *Persepsi wajib pajak terhadap Pajak Penjualan Atas Barang Mewah pada Kantor Pelayanan Pajak di kota Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Hassanuddin).
- Sariroh, S., Andi, A., & Nofianti, N. (2017). Self assessment system, penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan pajak pratama serang. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, 10(2).
- Siagian, M. A. (2019). Analisis Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Rangka Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam (Doctoral dissertation).
- Soemitro, Rochmat. 1996. Pengantar Singkat Hukum Pajak. PT eresco. Jakarta.
- Suandy, Erly. 2003. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Suartana,Wayan. 2010. Akuntansi Keprilakuan: Teori dan Implementasi.Yogyakarta: Penerbit Andi
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian dan Pengembangan, Penerbit Alfabeta Bandung. Yogyakarta.
- Sukardji, Untung. 2014. Pokok-Pokok PPN Pajak Pertambahan Nilai Indonesia. Edisi Revisi. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suprianto, Edy. 2011. Akuntansi Perpajakan. Graha Ilmu, Semarang
- Syahputra, M. (2015). Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sanksi Administrasi terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Tania, B. T., Karamoy, H., & Rondonuwu, S. (2018). Analisis Efektivitas Pelunasan Hutang Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Going concern: jurnal riset akuntansi,
- Tunas, D. S. (2013). Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1 (4).
- Urifa. Arwa (2009), Evaluasi Atas Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Rokok Roky InterSari, D. P. (2012). Persepsi wajib pajak terhadap Pajak Penjualan Atas Barang Mewah pada Kantor Pelayanan Pajak di kota Makassar (Doctoral dissertation Universitas Hassanuddin).nasional Kalen Kedungpring Lamongan. Skripsi UNISDA Lamongan, Tidak Dipublikasikan
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta



- Wardani, D. M. (2014). Pengaruh Sanksi Administrasi dan Surat Paksa terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Warliana, S., & Arifin, S. B. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis
- Yanah. 2013. The Impact Of Administrative.Sanction And Understanding Of Income Tax Law On Corporate Taxpayer's Compliance. The International Journal Of Social Sciences, 12 (1), pp: 55-75.